

The Corporation

The Pathological Pursuit of Profit and Power

Joel Bakan

Pengantar dan Latar Belakang

Bakan mengawali tulisannya dalam buku ini dengan mengutip pertanyaan Sam Donaldson kepada mantan pemimpin NYSE Richard Grasso dalam wawancara di televisi ABC “apakah kita tengah membicarakan para eksekutif yang berperilaku buruk, atau adakah sesuatu di dalam sistem yang sedang rusak?” Menjawab pertanyaan Grasso mengakui bahwa memang ada kegagalan, dan mengupayakan untuk menemukan penyebab utamanya, apakah disebabkan oleh karena profesional yang berperilaku buruk. Persoalannya apakah perilaku buruk atau lainnya, namun masyarakat sekarang peduli bahwa kegagalan sistem korporasi berdampak lebih dalam dari hanya sekedar guncangan yang terjadi di bursa saham semacam NYSE.

Premise kunci yang diajukan Bakan adalah bahwa korporasi sebagai sebuah institusi yang memiliki struktur unik dan dilengkapi dengan seperangkat ketentuan yang mengatur tindakan personalia di dalamnya. Korporasi juga merupakan institusi legal, suatu lembaga yang keberadaan dan kapasitasnya untuk berbuat sesuatu ditentukan oleh hukum. Mandat korporasi secara legal didefinisikan sebagai untuk memperoleh, tanpa henti dan tanpa kecuali, keuntungan pribadi (*self interest*), tanpa memedulikan apakah upayanya tersebut berdampak merugikan kepada pihak-pihak lain. Melihat fenomena seperti ini Bakan menyebut korporasi sebagai institusi yang tidak masuk akal, tidak mudah dikendalikan (*pathological*), makhluk berbahaya yang memiliki kekuatan untuk melemahkan (*wields*) orang lain dan masyarakat.

Hal-hal tersebut di atas menimbulkan pertanyaan, bagaimana korporasi terbentuk hingga seperti sekarang? Apa sifat dan implikasi dari sifat patologis ini terhadap orang lain dan masyarakat? Dan, apa yang dapat dilakukan guna mencegah potensi negatif yang merugikan berbagai pihak? Buku ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Dari kajian ini pembaca diharapkan dapat menemukan kembali jalinan krusial yang hilang dalam upaya masyarakat memahami dan melakukan sesuatu yang terkait dengan isu-isu penting pada waktu ini dan mendatang.

Ide Utama

Bakan menyatakan bahwa korporasi diciptakan oleh hukum untuk berfungsi seperti psychopat yang berperilaku merusak, dan bila tidak dikendalikan menjurus kepada skandal dan kehancuran. Dengan melakukan kajian terhadap korporasi sebagai institusi ekonomi dan berbadan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Peter F. Drucker, Bakan mengajukan premis sebagai berikut:

1. mandat korporasi yang terdefinisi secara sah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi secara terus menerus, tanpa memedulikan konsekuensi yang merugikan bagi pihak lain;
2. kepentingan-diri korporasi yang tidak terkendalikan dapat mengorbankan individu, masyarakat, dan ketika event yang terjadi tidak sesuai dengan yang direncanakan dapat merugikan pemegang saham, dan lebih jauh merubuhkan diri sendiri;
3. meskipun tanggung jawab sosial korporasi dalam beberapa hal berjalan dengan baik, ia seringkali hanya dilakukan sebagai topeng menutupi karakter korporasi yang sebenarnya;
4. secara tidak langsung pemerintah menyerahkan sebagian besar kekuasaan pengendalian terhadap korporasi, walaupun mengetahui karakter buruk korporasi, dengan membebaskannya dari hambatan hukum melalui deregulasi, dan dengan memberikan otoritas yang lebih tinggi dari masyarakat melalui privatisasi.

Bakan percaya bahwa perubahan terhadap kondisi tersebut dimungkinkan. Untuk itu Bakan memberikan sebuah program reformasi jangka panjang yang kongkret, pragmatis, realistik melalui regulasi hukum serta kendali demokrasi (*democratic control*).

Research or not? What Methodology?

Buku ini ditulis dari hasil riset yang secara ekstensif dilakukan melalui interview dengan berbagai figur terkenal atau CEO perusahaan-perusahaan besar, seperti Hank McKinnell dari Pfizer, Pemenang hadiah Nobel Milton Friedman, pakar bisnis Peter Drucker, dan Noam Chomsky dari MIT.

Argumen Penulis

Bakan mengatakan bahwa selama 150 tahun terakhir ini korporasi telah mengalami peningkatan menjadi lembaga keuangan dunia yang paling dominan. Korporasi memberi kehidupan, menentukan apa yang kita makan, tonton, kenakan, kerjakan, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat melarikan diri dari pengaruh budaya, simbol-simbol dan ideologi yang sengaja diciptakan oleh korporasi. Kekuatan korporasi sungguh luar biasa, mampu menampilkan dirinya agar terlihat hebat, bermanfaat, dan mulia bagi manusia. Dalam waktu bersamaan, peran Korporasi dalam memengaruhi kebijakan publik baik yang diterbitkan oleh Pemerintah maupun lembaga publik lainnya juga semakin tidak dapat dianggap kecil, bahkan semakin menguat. Kebangkitan dominasi korporasi merupakan pertanda penting dalam sejarah modern, hal ini – demikian argumen Bakan – disebabkan oleh karena tanda – tanda ketidak-berhasilan perusahaan telah dimulai.

Penyakit korporasi sejatinya sudah muncul sejak lama, jauh sebelum kasus Enron muncul. Korupsi dan penyalah-gunaan (*fraud*) adalah dua contoh aksi yang lazim terjadi di korporasi. Praktek spekulasi yang dimaksudkan untuk memengaruhi harga saham juga mewarnai praktek korporasi, harga saham dalam waktu singkat melonjak tinggi, namun tiba-tiba turun drastis. Pada tahun 1698 otoritas perdagangan saham Inggris melarang perdagangan saham kepada pihak –pihak yang dianggap tidak bertanggung jawab, kehilangan reputasi, dan yang dengan sengaja memerlakukan dan menyebarkan penjualan saham secara melawan hukum. Memerhatikan hal ini, pelaku bisnis dan politisi telah memerhatikan secara khusus korporasi sejak pertama kali muncul di akhir abad 16.

Dalam perkembangan selanjutnya, hingga abad milenium ini, korporasi telah menjadikan dirinya sebagai pengatur *society*, barangkali bahkan lebih besar dari kewenangan pemerintah. Ironisnya, kekuasaan inilah – yang diperoleh dari globalisasi ekonomi – yang membuat korporasi mudah dihancurkan (*vulnerable*). Sebagaimana terjadi di lembaga yang berkuasa, saat ini di dalam korporasi mudah terjadi pengingkaran kepercayaan (*mistrust*), ketakutan dan tuntutan akuntabilitas dari masyarakat yang semakin cemas terhadap kinerja korporasi. Menyikapi hal ini, pemimpin korporasi perlunya membangun kepercayaan dari publik, dan sebagaimana para pendahulunya melakukan, pemimpin saat ini juga mencoba memerhalus citra

korporasi dengan tampil secara humanistik, baik hati, dan memiliki tanggung jawab sosial. Upaya pencitraan korporasi menjadi semakin marak.

Namun demikian, pencitraan semata tidaklah cukup, mengutip kalimat Sam Gibara, Bakan mengatakan korporasi perlu membangun dirinya agar dapat lebih dipercaya. Pendapat ini dilatar-belakangi oleh fakta bahwa telah terjadi transfer “kekuasaan” dari pemerintah kepada korporasi, dan oleh karena itu korporasi perlu meningkatkan tanggung-jawabnya, menghormati masyarakat di mana mereka beroperasi, serta mampu membangun disiplin terhadap dirinya sendiri, segala sesuatu yang sebenarnya merupakan ciri dari pemerintahan yang baik. Jika perilaku baik ini tidak dapat dilakukan oleh korporasi, maka benarliah apa yang menjadi alasan bagi para aktivis, NGO dan berbagai elemen masyarakat lainnya yang memrotos keberadaan korporasi, yang dikatakan telah berubah menjadi pemegang kekuasaan yang berbahaya, mencampur-adukan antara kekuasaan dan perilaku tidak bertanggung-jawab.

Menjawab kekhawatiran masyarakat, pemimpin bisnis mencanangkan tanggung jawab sosial korporasi (CSR), sebuah credo baru kesadaran untuk melakukan koreksi atas visi serakah di masa lalu. Namun demikian, meski telah terjadi pergeseran paradigma, perilaku korporasi tidak banyak banyak berubah. Korporasi tetap berperilaku sebagaimana mereka lakukan di pertengahan abad 19. Kasus Enron mencerminkan hal ini, korporasi menunjukkan karakter buruknya. Sayangnya perusahaan semacam Enron tidak hanya satu, Bakan mengatakan semua perusahaan publik memiliki sifat serakah, meski pada korporasi sekelas Pfizer yang terkenal sangat murah hati, dan memiliki program tanggung jawab sosial yang berhasil.

Dalam bagian lain, Bakan menyatakan korporasi merupakan produk hukum dan oleh karenanya dalam bertindak dan berperilaku mesti mengacu pada ketentuan hukum. Hukum menentukan apa yang boleh dan tidak dilakukan oleh para manajer. Mengutip Milton Friedman, Bakan mengatakan institusi mendorong eksekutif untuk memrioritaskan kepentingan perusahaan dan pemegang saham di atas segalanya dan melarang mereka dari mengerjakan tanggung jawab sosial. Mendahulukan kepentingan utama korporasi sekarang ini berlaku di hampir semua hukum korporasi di berbagai negara. Hukum melarang adanya motivasi lain di luar tujuan utama perusahaan, apakah itu membantu pekerja, meningkatkan kualitas lingkungan, atau membantu konsumen menghemat uang mereka. Jika hal-hal filantropis ini tetap akan

dilakukan, maka dananya diambil dari sumber pribadi, bukan dari dana perusahaan. Argumen ini dilatar-belakangi oleh adanya kewajiban bagi para eksekutif dan atau manajer untuk menjaga investasi yang telah ditanamkan oleh pemegang saham, dan oleh karena itu para eksekutif ini tidak memiliki kewenangan hukum ketika hendak melakukan hal-hal yang bersifat memenuhi keinginan pribadi. Keberadaan manajer semata dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pemilik korporasi, yang artinya memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Memerhatikan argumen di atas, maka tanggung jawab sosial korporasi oleh karenanya menjadi ilegal – paling tidak dalam konteks aslinya. Pendapat ini disokong oleh Robert Hinkey yang berujar bahwa hukum dalam bentuknya seperti sekarang ini, sebenarnya menghambat eksekutif dan korporasi menjalankan tanggung jawab sosial korporasi. Pertanyaannya, apakah korporasi-korporasi besar yang sekarang ini menunaikan tanggung jawab sosial tergolong melanggar hukum? Friedman tidak sependapat, dia mengatakan bahwa tanggung jawab sosial masih dapat ditoleransi jika layanan dalam kerangka memenuhi kepentingan korporasi. Dengan kata lain, tanggung jawab sosial menjadi tidak tepat ketika berdampak pada memperburuk kinerja perusahaan.

Hingga hari ini hukum masih tetap sama: pemberian berdasar kemurahan hati harus dalam kerangka memenuhi kepentingan siapa saja yang melakukannya, dalam hal ini korporasi dan pemegang saham. Artinya, ketentuan yang mengatur keberadaan korporasi utamanya dimaksudkan guna memaksimalkan *return* kepada pemegang saham. Ketentuan semacam ini disebut “*the law of the land*” merujuk pada pengertian yang telah diterima secara universal, tidak ada yang membantahnya. Apapun retorika tentang tanggung jawab sosial dan pemangku kepentingan, apapun kemasam atau sentimen yang ditawarkan, apapun program yang dikerjakan, semua itu tujuan utamanya adalah guna memperoleh profit bagi korporasi. Sehingga, korporasi berperilaku baik hanya dengan maksud membantu dirinya sendiri, batasannya terletak pada seberapa bagus korporasi mengerjakan itu semua.

Korporasi terdiri dari sekumpulan orang, dan orang-orang ini membuat keputusan, tidak semua orang yang bekerja di korporasi berperilaku buruk atau bersifat suka mengeksplorasi orang lain. Di sisi lain, ada pemikiran dasar yang banyak dianut korporasi, bahwa tugas eksekutif adalah mencari keuntungan semata untuk memenuhi kepentingan pemegang saham. Artinya, *value* tertentu mendapat perhatian, di pihak lain justru diabaikan. Sayangnya yang selalu mendapat perhatian

penuh adalah segala sesuatu yang dapat mendorong terjadinya peningkatan keuntungan (*bottom line*). Konsekuensi dari dinamika semacam ini, sebagaimana dikatakan oleh Alisdair MacIntyre, bagi eksekutif korporasi pertimbangan moral ditempatkan pada posisi utama, memihak pada citizen atau konsumen dari pada hanya pada eksekutif.

Korporasi sulit melepas diri dari keberadaannya sebagai psychopath, selalu memelihara dan mengutamakan kepentingannya sendiri dan tidak mampu merasakan kepentingan pihak lain dalam berbagai konteks. Dr. Hare menyebut ada kesamaan sifat psychopathic yang ada pada manusia dan korporasi. Beberapa sifat tersebut antara lain: tidak bertanggung jawab (*irresponsible*), hanya karena ingin memuaskan sasaran korporasi semua orang harus menghadapi resiko; mencoba untuk memanipulasi (*manipulate*) segala sesuatunya, termasuk opini publik; dan merasa paling besar (*grandiose*), selalu menganggap dirinya nomor satu, terbaik; tidak memiliki empati (*empathy*) serta kecenderungan asosial (*asocial tendency*) melengkapi sifat buruk korporasi. Selain sifat tersebut di atas, korporasi acapkali menolak menerima tanggung jawab dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak mampu menyesali diri, jika korporasi melakukan kesalahan lebih baik membayar denda atas kesalahan yang dilakukannya tersebut, dan terus melakukan kesalahan serupa di kemudian hari.

Akhirnya, korporasi berinteraksi dengan pihak lain hanya pura-pura belaka (*superficial*), tujuan utama korporasi adalah untuk mempresentasikan dirinya di hadapan publik sedemikian rupa sehingga terkesan menarik namun pada kenyataannya tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam organisasi. Bagi korporasi, tanggung jawab sosial dapat diperankan sedemikian rupa menyerupai sifat ini. Praktek semacam ini dicontohkan oleh Enron, yang akhirnya berujung pada kebangkrutan akibat keserakahan, membanggakan diri sendiri mengabaikan saran orang lain, dan melakukan tindak kriminal.

Pelajaran lebih penting dari sekedar curiga terhadap tanggung jawab sosial yang dapat ditarik dari kasus Enron, adalah meskipun perusahaan sekarang ini terkesan buruk karena karena eksekutifnya yang arogan dan tidak etis, alasan utama kejatuhan perusahaan-perusahaan besar dapat dilacak pada karakteristik umum korporasi: obsesi kepada profit dan harga saham, keserakahan, kurangnya perhatian pada sesama, mudahnya melanggar aturan hukum. Semua ini berakar pada budaya

institusi, yang memberi nilai tinggi pada kepentingan pribadi dan mengabaikan pertimbangan moral.

Sebagai makhluk psychopath, korporasi tidak mampu mengenali atau beraksi atas dasar moral untuk tidak membuat rugi pihak lain. Tak ada satupun yang dapat membatasi apa yang dapat mereka lakukan dalam mendapatkan keinginan korporasi. Ketika benefit yang ingin diperoleh menjadi lebih penting dari pada biaya, hal inilah yang menjadi pendorong bagi timbulnya kerugian masyarakat. Pertimbangan pragmatis untuk memenuhi kepentingannya sendiri dan adanya *law of the land* yang dapat menghambat insting memangsa sesama makhluk (*predatory*), dan seringkali tidak cukup kuat untuk menghentikannya dari merusak kehidupan, menghancurkan komunitas, dan membahayakan planet bumi secara keseluruhan.

Dalam konteks ekonomi perilaku sebagaimana diuraikan di atas dinamai *externalities*, yakni pengaruh dari adanya transaksi terhadap pihak ketiga yang tidak ada sangkut-pautnya dengan transaksi tersebut. Externalities yang ditimbulkan oleh korporasi berdampak luar biasa bagi dunia secara luas. Meski pengaruh tersebut dapat saja positif, seperti terciptanya lapangan kerja dan munculnya produk-produk yang bermanfaat bagi manusia, namun tidaklah membesar-besarkan bila dikatakan bahwa korporasi dibangun dalam tekanan untuk membebaskan biaya pada lingkungan sosial.

Menyikapi fenomena ketidak-taatan pada ketentuan hukum dalam dunia korporasi, Bakan berpendapat bahwa struktur unik korporasi-lah yang menjadi penyebabnya. Dengan sengaja, korporasi melindungi pemilik dan pengelolanya dari kewajiban hukum. Pemegang saham tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukan korporasi karena adanya keterbatasan tanggung jawab. Tidak hanya pemegang saham yang dapat luput dari kewajiban hukum, namun direktur dan eksekutif korporasi juga dapat menikmati keistimewaan serupa. Meskipun demikian, dalam berbagai hal korporasi dapat menjadi target prosekusi, karena korporasi tidak punya jiwa dan tidak ada individu yang dapat ditendang. Korporasi tidak punya kewajiban moral sama seperti gedung, organization chart atau surat kontrak. Bagi korporasi, taat pada hukum tidak lebih dari urusan biaya dan benefit.

Sebagai institusi psychopath, korporasi selalu berusaha membuang hambatan yang menghalangi langkahnya. Regulasi yang membatasi kebebasan untuk mengeksploitasi manusia dan lingkungan sekitar merupakan hambatan yang harus diperangi oleh korporasi. Upaya memerangi hambatan ini dilakukan melalui lobby,

donasi bagi para politisi, dan kampanye publik yang dilakukan secara profesional, serta menggalang opini publik yang mendukung upaya korporasi. Akhirnya masyarakat yang tidak berdosa menjadi korban dari aksi korporasi ini.

Ironisnya, banyak pelaku bisnis pengelola korporasi yang beranggapan bahwa segala upaya yang dilakukannya ketika memengaruhi proses politik merupakan suatu bentuk layanan publik dan suatu bentuk hubungan wajar antara pelaku bisnis dan pemerintah. Persoalan bagi masyarakat, jika korporasi dan pemerintah benar – benar merupakan mitra, hal serius yang perlu diperhatikan adalah keberadaan demokrasi, karena dalam kondisi semacam ini secara efektif pemerintah dapat menyerahkan kedaulatannya kepada korporasi.

Resep

Tantangan yang harus dijawab pada saat ini adalah menemukan cara bagaimana mengendalikan korporasi, dengan memerhatikan kendala demokrasi dan kepentingan melindungi warga-negara dari kecenderungan negatif. Meningkatkan legitimasi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah merupakan opsi terbaik, atau paling tidak yang strategi sangat realistis. Secara lebih rinci, Bakan mengusulkan resep mengatasi perilaku buruk korporasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sistem Pengaturan

- Regulasi pemerintah sebaiknya disempurnakan, dan legitimasinya ditingkatkan dengan tujuan utama membawa korporasi kembali di bawah kendali demokrasi serta memastikan bawah mereka menghormati kepentingan warga masyarakat serta lingkungan.
- Regulasi harus lebih efektif, dengan meningkatkan profesionalisme para pejabat publik, menetapkan hukuman dan atau denda bagi korporasi yang melakukan tindak kriminal, meningkatkan tanggung jawab dan ketaatan hukum di kalangan eksekutif korporasi, menutup peluang bagi korporasi yang terbukti melanggar hukum untuk memperoleh proyek pemerintah, dan menanggukhan pendirian korporasi yang tidak menghormati atau melanggar kepentingan publik.
- Regulasi dirancang guna melindungi lingkungan, kesehatan dan keselamatan masyarakat. Regulasi ini mesti didasarkan pada prinsip – prinsip pencegahan

yang intinya bahwa korporasi dilarang berbuat sesuatu yang menyebabkan kerugian.

- Sistem pengaturan (*regulatory system*) perlu direformasi guna meningkatkan akuntabilitas dan menghindari *agency capture* serta kecenderungan sentralisasi birokrasi. Pemerintah daerah perlu memainkan perannya pebib besar dalam sistem pengaturan karena mereka dianggap lebih dekat dengan warga masyarakat dalam memberikan layanan publik, serta dalam posisi yang lebih baik dalam upaya membangun kerja sama dengan kelompok warga.
- Asosiasi dagang dan asosiasi pekerja perlu meningkatkan perannya dalam memantau dan mengatur perilaku korporasi. Kepentingan kedua organisasi ini seperti lingkungan, konsumen, hak azasi manusia seringkali terganggu oleh aksi korporasi.

2. *Memperkuat Demokrasi Politik*

- Pemilihan umum harus dibiayai dengan dana publik, donasi dari korporasi tidak diperkenankan, serta batasan ketat terhadap lobby dan aliran personel dari pemerintahan ke bisnis, di mana pengaruhnya dapat menguntungkan korporasi namun membahayakan proses demokrasi.
- Reformasi sistem pemilihan umum perlu dilakukan guna membawa suara batu ke dalam sistem politik dan mendorong masyarakat yang tidak puas untuk kembali menjadi pemilih, representasi yang bersifat proporsional perlu diupayakan.

3. *menciptakan lingkungan publik yang kuat dan sehat*

- Berbagai kelompok sosial dan kelompok kepentingan yang dianggap penting bagi publik atau sangat jarang, rentan, atau harus dimurnikan dari pengaruh eksploitasi korporasi, perlu diatur dan dilindungi oleh pemerintah. Kebijakan Perlindungan ini dapat saja menimbulkan debat mengenai kriteria kelompok yang layak dilindungi, atau ukuran apa yang harus digunakan untuk menentukan perlu-tidaknya suatu kelompok atau aktivitas dilindungi, dan bagaimana melindunginya. Debat semacam ini, jika dilakukan secara asehat dan melibatkan juga korporasi diharapkan dapat membangun kesadaran eksekutif korporasi untuk dapat lebih memahami lingkungan di luar lingkungan bisnisnya, yang mungkin saja menerima dampak negatif dari sebagian datau keseluruhan aksi korporasi.

- Aturan-aturan yang berlaku di korporasi perlu diuji untuk menjadikan sistem nilai berlaku kembali serta menghilangkan praktek-praktek yang menghambat demokrasi, keadilan sosial, serta simpati kepada masyarakat.

Keterkaitan Dengan Pandangan Atau Referensi Lain

Buku Bakan ini senada dengan literatur lain - bernada anti-neoliberalism - yang menggugat eksistensi institusi penopang utama ideologi kapitalisme: korporasi. Pandangan Bakan diulas lebih dalam lagi dalam karya audio-visual oleh Mark Achbar yang kemudian menjadi sutradara dari sebuah film bertajuk *Corporation*. Di mata hukum, sebuah perusahaan sebenarnya memiliki kedudukan yang sama dengan seorang manusia. Dia memiliki hak-hak, bisa memiliki properti, memiliki kekuasaan dan otoritas. Jika korporasi mirip dengan sosok manusia, Achbar ingin menggambarkan seperti apa sosok korporasi. Dengan menggunakan sarana diagnosa gangguan mental (Diagnostic and Statistical of Mental Disorder) Achbar berkesimpulan bahwa sifat-sifat dasar korporasi menunjukkan sifat-sifat dasar orang yang menderita gangguan psikopat.

Prinsip-prinsip kerja sebuah korporasi mengarah kepada sebuah kepribadian yang antisosial dan psikopat tersebut antara lain egois, pengecut, amoral, tidak pernah merasa bersalah terhadap pihak lain, berbahaya bagi manusia yang menjadi pekerjanya, dan menghalalkan segala cara - termasuk menabrak norma-norma sosial dan aturan hukum – untuk mencapai tujuannya. Meski korporasi kadang-kadang suka menampilkan niat dan itikad baik kepada orang lain dalam bentuk yang mereka namakan corporate social responsibility, tidaklah selalu niat tersebut benar-benar tulus, karena di dalamnya selalu ada kepentingan utama, mencapai keuntungan materi.

Literatur lain yang dapat dikelompokkan ke dalam arus pemikiran Bakan antara lain karya Joseph E. Stiglitz dalam *Globalization and Its Discontent* atau Eric Schlosser dalam *Fast Food Nation*, dan Michael Moore dalam *Stupid White Men*. Stiglitz menggambarkan – sebagaimana diuraikan oleh Bakan – bagaimana kebijakan publik dipengaruhi oleh kepentingan privat (korporasi) melalui upaya lobby, sehingga berhasil dalam upaya privatisasi dan liberalisasi pasar, yang pada bagian ujungnya menimbulkan krisis di berbagai negara. Ideologi pasar bebas berperan sebagai wajah depan dari segala kepentingan korporasi ini. Jika Bakan melihat perilaku korporasi dari sisi hukum, Stiglitz melihat perilaku pembuat kebijakan dan pengaruh korporasi terhadap proses kebijakan publik dari sudut pandang ekonomi politik.

Kritik

Ketika mengungkapkan kasus General Motor (seorang Ibu dengan dua anak berkendara Chevrolet Malibu, ditabrak dari belakang, ketika sedang berhenti di lampu lalu lintas, Malibu terbakar) ada beberapa hal yang tidak diungkapkan oleh Bakan. Pertama, pengendara mobil yang menabrak ternyata sedang mabuk, kandungan alkohol di dalam darahnya mencapai 0.2mg/l di atas standar wajar 0.008 mg/l. Kedua, Chevrolet Malibu memiliki catatan keselamatan yang sangat baik, khususnya berkaitan dengan rancangan tangki bahan bakar.

Dalam menguraikan pendapatnya di buku ini, Bakan terlihat hanya melihat korporasi dari aspek kepatutan hukum dalam hubungannya dengan perilaku sosial kemasyarakatan. Namun demikian Bakan, barangkali karena latar belakang minat, pendidikan dan profesional-nya, tidak melihat nilai resiko yang akan diderita oleh pemegang saham apabila investasi yang ditanamkan di dalam korporasi gagal. Resiko ini tentu saja tidak hanya diderita oleh pemegang saham, tetapi juga oleh stakeholder (karyawan, pemerintah, pelanggan, dan lain sebagainya). Sebagai misal apabila suatu investasi yang ditanamkan dalam korporasi gagal, maka dampaknya akan muncul pengangguran baru, kegiatan ekonomi terganggu, yang pada akhirnya dapat pula memengaruhi tingkat keamanan masyarakat.

Komentar dan Kemungkinan Riset Lanjutan

Karya Bakan ini dapat membuka peluang bagi penelitin lanjut mengenai perilaku organisasi. Bila Bakan hanya melihat dari aspek hukum dan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi serta perilaku korporasi, kajian semacam ini akan lebih lengkap apabila juga dilihat dari perspektif pemegang saham, yang dikatakan oleh Bakan sebagai pihak yang paling berhak menjadi penerima pertama manfaat aktivitas korporasi. Perlu dikaji, apakah para pemegang saham dan eksekutif secara sengaja membuat kerusakan, melulu memrioritaskan tujuannya mencari profit dan mengabaikan kepentingan lain, atau seperti kata Bakan, sementara mencari profit, korporasi menciptakan kerusakan lingkungan tanpa mau bertanggung jawab.

Dalam banyak kasus di negara maju, regulasi yang mengatur dan mengawasi perilaku korporasi sudah dibuat dengan komprehensif, tetapi itupun masih bisa diakali oleh korporasi. Sementara itu, bisa dibayangkan bagaimana praktik korporasi di negara – negara miskin dan sedang membangun yang pemerintahnya tidak terlalu kuat dalam menghadapi desakan atau lobby korporasi. Kendala – kendala strategis

yang dihadapi pemerintah dalam mengatur perilaku korporasi di satu pihak; dan bagaimana korporasi bisa menaati peraturan, menghormati adat istiadat, tanpa harus kehilangan keuntungan layak menjadi topik riset lanjutan.*****